

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi****Vinni Aprilianti¹, Asti Harkeni²**
Vinnia80@gmail.com; asti.harkeni@gmail.com^{1,2} Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi**Abstrak**

Peningkatan PAD pada suatu daerah harus berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena meskipun terjadi peningkatan dalam penerimaan PAD namun tidak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, bisa diindikasikan adanya eksploitasi PAD terhadap masyarakat secara berlebihan tanpa memperhatikan peningkatan produktifitas masyarakat itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik regresi data panel dengan metode PCSE menggunakan aplikasi program STATA. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data PDRB, Ketimpangan wilayah, jumlah tenaga kerja, *government size* dan PAD pada 11 Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Jambi sejak tahun 2013 sampai 2017. Hasil analisa menunjukkan bahwa PAD berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.

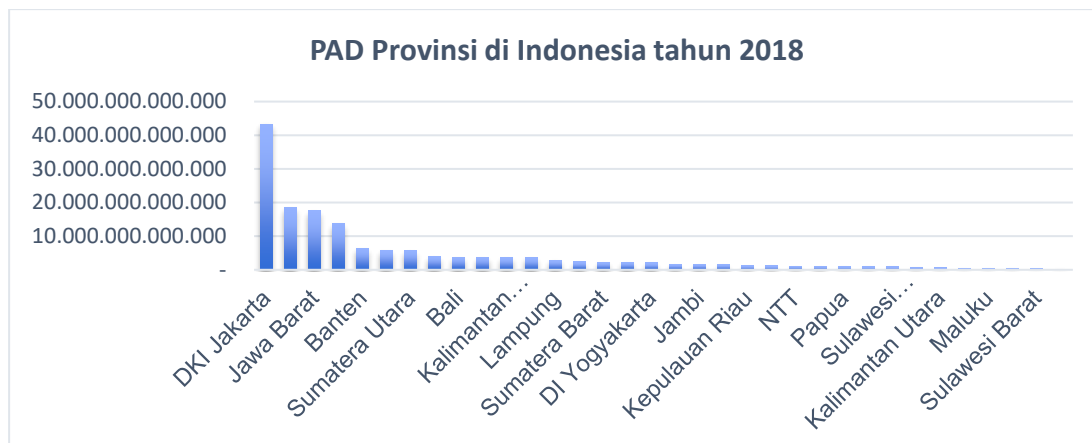
Kata Kunci: *Pertumbuhan Ekonomi; PAD; Government Size; PCSE***Pendahuluan**

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan yang ada di daerah-daerah dengan cara seluas-luasnya meski peningkatan kesejahteraan menghadapi banyak sekali tantangan. Menurut (Parsiyo and Madya, 2013) beberapa indikator yang menentukan keberhasilan pembangunan nasional antara lain pertumbuhan ekonomi, indeks kualitas hidup, struktur ekonomi, indeks pembangunan manusia, kesehatan, pendidikan dan urbanisasi. Sedangkan factor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain pendapatan, pembiayaan dan belanja. Diantara ketiga factor tersebut, pendapatan merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi memacu pemerintah daerah memaksimalkan pemberdayaan sumber daya potensial yang ada, serta membuka peluang menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut.

Sejak adanya Undang-Undang UU Nomor 23 Tahun 2014, pelaksanaan pemerintahan berubah dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi yang menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengurangi ketergantungannya pada pemerintah pusat. Oleh karena itu, daerah-daerah dituntut untuk lebih kreatif dalam menunjang pembangunannya baik melalui peningkatan PAD maupun efisiensi dalam mengalokasikan anggaran pembangunan. Data realisasi PAD terdiri dari pendapatan

pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (HPKD) dan lain-lain PAD yang sah.

Menurut (Halim and Kusufi, 2012) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah itu sendiri. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Anggaran, Provinsi Jambi berada pada peringkat ke-19 urutan PAD dari 34 Provinsi di Indonesia yaitu senilai Rp. 1.657.078.868.263,- (Katadata, 2018) seperti ditampilkan pada Gambar 1.

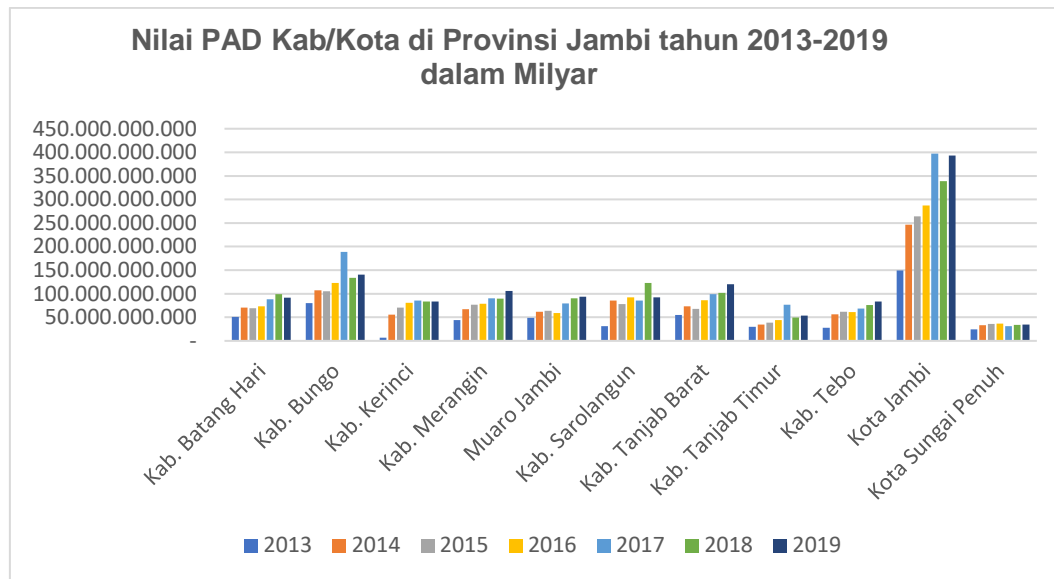


Gambar.1 Peringkat PAD Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2018

(Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/>)

Berdasarkan gambar di atas, DKI Jakarta merupakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi yaitu sebesar Rp 43,33 triliun pada 2018 kemudian Provinsi dengan PAD tertinggi kedua adalah Jawa Timur sebesar Rp 18,53 triliun, dan pada peringkat ketiga yaitu Provinsi Jawa Barat yang memiliki PAD 17,58 triliun kemudian dilanjutkan oleh Provinsi Jawa Tengah dengan nilai PAD sebesar Rp 13,71 triliun di peringkat keempat. Dalam banyak hal Provinsi DKI Jakarta memiliki banyak keunggulan dalam proses Pembangunan. Provinsi DKI Jakarta tentu akan menjadi rujukan bagi pembangunan di daerah lainnya terutama Provinsi Jambi. Hasil PAD DKI Jakarta menggambarkan bagaimana kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Perkembangan nilai PAD Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi dapat dilihat pada Gambar 2. Terlihat bahwa Kota Jambi adalah penerima PAD terbesar di Provinsi Jambi dan Kota Sungai Penuh berada paling rendah sebagai penerima PAD di Provinsi Jambi. Kota Sungai penuh merupakan kota pemekaran baru sehingga nilai PAD belum maksimal didapat. Kabupaten Bungo pada tahun 2017 sempat memperoleh PAD besar yaitu lebih dari 150 Milyar Rupiah. Sedangkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki perkembangan yang lambat untuk kenaikan PAD dari tahun ke tahun.



Gambar.1 Nilai PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2013- 2019
(dalam Milyar) Sumber : (BPK, 2019)

Peningkatan PAD pada suatu daerah harus berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena meskipun terjadi peningkatan dalam penerimaan PAD namun tidak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, bisa diindikasikan adanya eksploitasi PAD terhadap masyarakat secara berlebihan tanpa memperhatikan peningkatan produktifitas masyarakat itu sendiri. Keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima saja, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur dan meningkatkan perekonomian serta memenuhi kebutuhan pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik sehingga produktifitas masyarakat dan investor meningkat yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi di daerah.

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu perkembangan kegiatan dalam bidang ekonomi yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi di masyarakat bertambah dan menyebabkan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah diindikasikan sebagai prestasi dan perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Tumbuhnya ekonomi di suatu daerah dapat bernilai positif dan juga dapat bernilai negatif. Jika pada suatu periode pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan yang positif, berarti kegiatan ekonomi di daerah tersebut meningkat. Apabila pada suatu periode pertumbuhan ekonomi suatu daerah mengalami pertumbuhan yang negatif, menandakan bahwa kegiatan ekonomi di daerah tersebut mengalami penurunan (Sukirno, 2004).

Menurut Adam Smith (seorang ahli ekonomi klasik), ada dua faktor utama pertumbuhan ekonomi yaitu (1) pertumbuhan output (GDP) total dan (2) pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah atas harga konstan, seperti table PDRB harga konstan Kab/Kota di Provinsi Jambi berikut:

Tabel 1. PDRB Atas Harga Konstan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2013-2017 (dalam Milyar Rupiah)

DAERAH	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Provinsi Jambi</i>	108.386	119.300	124.513	130.419	136.622
Kab. Batang Hari	8.641	9.298	9.695	10.136	10.624
Kab. Bungo	6.199	9.830	10.334	10.871	11.487
Kab. Kerinci	4.419	4.811	5.120	5.463	5.792
Kab. Merangin	7.110	7.583	7.993	8.490	8.961
Kab. Muaro Jambi	11.639	12.578	13.238	13.956	14.662
Kab. Sarolangun	8.268	8.675	8.987	9.369	9.809
Kab. Tanjabbar	23.085	24.552	25.446	26.245	27.362
Kab. Tanjabtim	14.678	15.550	15.841	16.258	16.766
Kab. Tebo	7.243	7.881	8.303	8.747	9.237
Kota Jambi	13.906	15.080	15.852	16.936	17.728
Kota Sungai Penuh	3.199	3.461	3.705	3.946	4.193

Sumber : BPS, 2021



= Nilai tertinggi

= Nilai terendah

Berdasarkan Tabel 1. Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki nilai PDRB atas Harga Konstan tertinggi sepanjang periode penelitian. Kemudian dibandingkan dengan Kota Sungai Penuh memiliki nilai PDRB yang rendah. Perkembangan nilai PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi semuanya memiliki trend naik atau meningkat.

Hasil penelitian Nurhuda, et al (2013) yang menggunakan PAD sebagai salah satu variabel kontrol dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sedangkan Apriana (2010) yang melakukan analisis hubungan antara belanja modal, PAD, kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi, menyimpulkan bahwa PAD tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, karena peningkatan PAD tidak serta merta meningkatkan daya beli masyarakat maupun kesejahteraanya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang timbul, yaitu bagaimanakah pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi periode 2013 sampai dengan 2017?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupate/ Kota di Provinsi Jambi.

Hipotesis Penelitian:

Berdasarkan teori yang ada serta kajian empirik, maka hipotesis yang merupakan jawaban sementara pada penelitian ini adalah: diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jambi serta Pemerintah Provinsi Jambi dalam Menyusun kebijakan dan program kerja terkait pembangunan guna mereduksi ketimpangan antar wilayah di Provinsi Jambi.

Pendahuluan

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut (Mardiasmo, 2002) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang didapat dari berbagai sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu variabel kontrol yang digunakan pada penelitian ini.

Pertumbuhan Ekonomi

Variabel Logaritma PDRB atas harga konstan digunakan untuk mengcapture pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Keputusan ini diambil merujuk pada penelitian Rahmayanti and Theara (2010) serta Alexiou (2009). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara dan timbul akibat aktivitas ekonomi suatu negara pada periode waktu tertentu (BPS, 2018).

Ketimpangan Wilayah

Definisi dari ketimpangan ekonomi adalah perbedaan pembangunan ekonomi antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya secara horizontal dan vertikal yang menyebabkan ketidakmerataan pembangunan (*disparitas*). Jeffrey G. Williamson (1965) menggunakan data ekonomi negara yang sudah maju dan sedang berkembang dengan mencoba meneliti hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi dengan disparitas regional. Ditemukan bahwa *disparitas regional* akan lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu pada tahap awal pembangunan (Williamson, 1965). Pada tahap pertumbuhan ekonomi yang lebih "matang" akan terjadi keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan. Williamson menggunakan *Williamson Index* (Indeks Williamson) untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. Indeks Williamson menggunakan PDRB per kapita sebagai data dasar. karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah bukan tingkat kesejahteraan antar kelompok.

Tenaga Kerja

Menurut Nurdin E, dan Budi agustina Dina, dalam (Jamli, 2012) tenaga kerja merupakan penduduk yang berumur 10 tahun atau lebih yang sudah atau sedang bekerja, sedang melakukan pekerjaan lain bersekolah atau mengurus rumah tangga. Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi dua yaitu (1) tenaga kerja rohani, yaitu tenaga kerja yang segala kegiatan pikiran yang memberikan sumbangan produktif untuk produksi, (2) tenaga kerja jasmani, yaitu tenaga kerja yang segala kegiatan jasmani atau badaniah yang di tunjukan untuk produksi. Tenaga kerja jasmani dapat dikelompokkan yaitu (a) tenaga kerja terdidik (*Skilled Labour*), (b) tenaga kerja terlatih (*Trained Labour*) dan (c) tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih (*Unskilled an Untrained labour*). Sedangkan pengertian angkatan kerja yaitu penduduk berumur 10 tahun keatas yang bekerja atau punya pekerjaan sementara, tidak bekerja dan penduduk yang mencari pekerjaan.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode pendekatan deskriptif dan pendekatan verifikatif. Penelitian ini menggunakan data panel. Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan adalah data sekunder.

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel-Variabel

Variabel	Data	Definisi	Ukuran	Sumber Data
1	2	3	4	5
IW	Ketimpangan Ekonomi	Nilai Indeks Williamson	Indeks	Data diolah
EG	PDRB	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) real atas dasar harga konstan per tahun yang digunakan untuk mengcapture pertumbuhan ekonomi	Ln	BPS
Labor	Tenaga Kerja	seluruh penduduk dalam usia kerja (15 tahun keatas) yang berpotensi memproduksi barang dan jasa	Ln	BPS
PAD	PAD	Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah	Ln	BPS
GS	<i>Government Size</i>	Rasio pengeluaran daerah terhadap PDRB	Rasio	Data diolah

Sumber: Hasil studi empiris

Penelitian ini menggunakan metode *Ordinari Least Square* (OLS) dengan *Fixed Effect Model* menjadi pilihan model terbaik. Metode *Ordinary Least Squares* (OLS) merupakan metode yang sering digunakan untuk mengestimasi parameter model regresi. Namun, setelah dilakukan uji asumsi klasik, maka pada model mengalami heteroskedastisitas dan autokorelasi. Bila terjadi gangguan heteroskedastisitas dan autokorelasi pada model maka dapat diperbaiki dengan menggunakan:

1. FGLS (*Feast Generalized Least Square*), jika jumlah tahun (*time series*) lebih besar daripada jumlah sampel ($T > N$)
2. PCSE (*Panel Corrected Standart Error*), jika jumlah sampel lebih besar daripada jumlah tahun ($T < N$).

Penelitian ini menggunakan PCSE, karena jumlah sampel yang digunakan lebih banyak daripada jumlah periode penelitian. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 11 (sebelas) kabupaten kota dengan periode penelitian 2013-2017. PCSEs merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas, autokorelasi dan ketergantungan *cross sectional* pada data panel. PCSE menggunakan OLS untuk menghasilkan estimasi koefisien, tetapi menggunakan matriks kovarian yang diperkirakan untuk menghitung standar error, Beck and Katz (1995) menemukan bahwa pendekatan ini menghasilkan standar error yang dapat diandalkan serta kuadrat rata-rata standar error yang relatif rendah. Ditambahkan Wibowo (2003) metode OLS-PCSE tidak mengubah poin koefisien estimasi dan hasil utama. Hanya standar error dan penyesuaian r-rasio yang berubah.

Model pada penelitian ini adalah :

$$EG_{it} = \alpha + \beta_1 INEQ_{it} + \beta_2 LnLABOR_{it} + \beta_3 GS_{it} + \beta_4 LnPAD_{it} + \mu_{it} \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan :

- INEQ : Ketimpangan wilayah yang merupakan hasil penghitungan Indeks Williamson
 LnLABOR : Jumlah penduduk bekerja
 GS : Government Size
 LnPAD : Pendapatan Asli Daerah
_{it} : Kabupaten -i pada tahun -t
 μ_{it} : Error di Kabupaten/Kota i pada tahun t
 α : *Intersep*
 β_{1-4} : Koefisien regresi

Hasil Dan Pembahasan

Metode *Panels Corrected Standard Errors* (PCSEs) dipilih karena model memiliki masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi yang memiliki jumlah $N > T$. Berdasarkan hasil regresi dengan metode PCSEs, maka hasil estimasi dari model terpilih dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3 Hasil Estimasi Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi

Variabel	Hasil Estimasi
Ketimpangan Wilayah	1,28 *** (0,07)
Tenaga Kerja	0,23 *** (0,05)
Government Size	-0,08 *** (0,005)
Pendapatan Asli Daerah	0,14 *** (0,05)
Prob > chi2	0,00
R-Squared	96,17

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 8 dengan nilai R^2 sebesar 96,17, dapat diinterpretasikan bahwa variasi dari perubahan nilai variabel pertumbuhan ekonomi mampu dijelaskan

secara serentak oleh variabel-variabel bebas sebesar 96,17 % *ceteris paribus* sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel bebas lain diluar model.

Uji terhadap hipotesis perlu dilakukan untuk menjawab tujuan dari penelitian. Nilai Probability >chi2 = 0,0000 < $\alpha=0,05$, sehingga menolak H0 yang berarti bahwa variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat yakni pertumbuhan ekonomi, sehingga model pertumbuhan ekonomi ini dapat digunakan.

Uji secara parsial terhadap variabel bebas juga dilakukan terhadap model dimana variabel ketimpangan wilayah, tenaga kerja, *government size* dan PAD signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang ditandai dari nilai probabilitasnya tidak ada yang besar dari nilai kritis 1%.

Pembahasan

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa Variabel ketimpangan wilayah memiliki koefisien sebesar 1,28 yang berarti memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan ketimpangan ekonomi sebesar 1 (satu) satuan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,28 satuan.

Variabel tenaga kerja memiliki koefisien 0,23 yang berarti memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tenaga kerja sebesar 1 (satu) satuan akan berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,23 satuan.

Variabel *government size* memiliki koefisien -0,08 yang berarti memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tenaga kerja sebesar 1 (satu) satuan akan berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,08 satuan.

Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki koefisien 0,14 yang berarti memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tenaga kerja sebesar 1 (satu) satuan akan berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,14 satuan, *ceteris paribus* Hasil ini sejalan dengan penelitian Nurhuda, et al (2013) yang menggunakan PAD sebagai salah satu variabel kontrol dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Simpulan Dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terbukti bahwa PAD signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi yakni PAD dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dimana peningkatan PAD sebesar 1 (satu) satuan akan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sebesar 0,14 Satuan.

Saran

Mengingat pengaruh PAD yang signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun persentase terhadap pendapatan daerah yang masih kecil, maka pemerintah harus dapat mengoptimalkan penerimaan PAD dari sumber-sumber yang

potensi seperti pajak dan retribusi. Upaya ekstensifikasi dengan melakukan inventarisasi wajib pajak baru yang belum terdata dan juga upaya intensifikasi pajak dan retribusi terhadap wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya. Selain itu pengawasan dan audit yang melekat terhadap penerimaan pajak dan retribusi agar tidak terjadi kebocoran dalam pelaksanaannya. Sehingga penerimaan dari pajak dan retribusi daerah dapat maksimal berkontribusi terhadap penerimaan daerah.

Daftar Pustaka

- [1] Alexiou, C. (2009) 'Government Spending and Economic Growth: Econometric Evidence from the South Eastern Europe (SEE).', *Journal of Economic and Social Research*.
- [2] Apriana, Dina. dan Suryanto, Rudi., 2010, "Analisis Hubungan Antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)", *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. XI No. 1, Januari
- [3] Bahmani-Oskooee, Mohsen, Hegerty, Scott W, W. H. (2008) 'Short Run and Long Run Determinants of Income Inequality: Evidence from 16 Countries. *Journal of Post Keynesian Economics*', *Journal of Post Keynesian Economics*, Vol. 30.
- [4] Beck, N. and Katz, J. N. (1995) 'What to Do (and Not to Do) with Time Series Cross Section Data.', *American Political Science Review*.
- [5] BPS (2018) *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi 2018*. BPS.
- [6] BPS (2019) *Berita Resmi Statistik*. 026/5/15/T. Jakarta.
- [7] BPS (2021) *Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)*.
- [8] Chatterjee, Santanu, and S. J. T. (2012) 'Infrastructure and Inequality', *European Economic Review*. doi: <https://doi.org/10.1016/j.eurocorev.2012.08.003>.
- [9] Halim, A. and Kusufi, S. (2012) *Akuntansi Sektor Publik: teori, konsep dan aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- [10] Katadata (2018) 'Inilah Pendapatan Asli Daerah_PAD 34 Pemprov 2018 _ Databoks', katadata.co.id. Jakarta. Available at: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/27/inilah-pendapatan-asli-daerahpad-34-pemprov-2018>.
- [11] Kuncoro, M. (2004) *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- [12] Mardiasmo (2002) *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah: Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- [13] Nurhuda, Rama., Muluk, Khairul., & Prasetyo, Wima Yudo.(2012). Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi di Provinsi Jawa Timur 2005-2011). *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 4. Parsiyo and Madya, W. I. (2013) *Indikator Keberhasilan Pembangunan*. Bogor: PPMKP Bogor.
- [14] Sukirno, S. (2004) *Pengantar Teori Makro Ekonomi, Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga.

- [15] Wibowo, K. (2003) *Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi: Kerangka Teoritis Dan Aplikasinya*. Modul 1.
- [16] Williamson, J. G. (1965) 'Regional Inequality and the Process of National Development: A Description of the Patterns', *Economic Development and Cultural Change*,. doi: <https://doi.org/10.1086/450136>.
- [17] Winarno, W. W. (2015) *Analisa Ekonometrikadan Statistika dengan Eviews*. empat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.